

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. KAJIAN TEORI

1. Kemiskinan

a. Pengertian kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya serba kekurangan dan tidak berharta benda. Kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar menurut Badan Pusat Statistika dan Departemen Sosial dalam Khabhibi (2013, hlm.13) merupakan, “ketidak mampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak”. Lebih jauh disebutkan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, “kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Menurut Badan Pusat Statistika (2020) “kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran”. Menurut Badan perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS) dalam Muzakir (2009, hlm.11) “kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dihendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang apa adanya”. Kumalasari dalam Karini (2018, hlm. 105) mendefinisikan “kemiskinan adalah keadaan terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan

oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan”.

Menurut Piven (2002, hlm. 198) kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari yang terkadang makanan tidak bertahan sampai akhir bulan dan tidak punya uang untuk membeli lebih banyak, juga ketika tidak mampu membayar sewa, hipotek, atau tagihan utilitas. “Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan” menurut Soegijoko dalam Kuswantoro (2016, hlm.19).

Menurut Suparlan (2000, hlm. 75) mendefinisikan bahwa “kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja”.

Menurut Todaro dan Smith dalam Utami (2014, hlm. 115) kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut :

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
2. Pendapatan perkapita negara-negara dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
3. Distribusi pendapatan timpang atau sangat tidak merata; 20 persen penduduk yang paling kaya menerima 5 hingga 10 kali lipat pendapatan yang diterima oleh 40 persen golongan yang paling miskin.
4. Mayoritas penduduk di negara-negara dunia ketiga harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara dunia ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju.
6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai. Selain itu, tingkat kegagalan penyelesaian pendidikan relative tinggi, sedangkan tingkat melek huruf masih sangat rendah.

b. Dimensi Kemiskinan

Chambers (1984, hal. 109) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kesatuan konsep (*intergrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (*Proper*)
Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.
2. Ketidakberdayaan (*Powerless*)
Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)
Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.
4. Ketergantungan (*dependency*)
Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.
5. Keterasingan (*Isolation*)
Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

c. Ciri-ciri Kemiskinan

Menurut Hartomo dan Aziz dalam Khabhibi (2013, hlm.16-18) mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu :

1. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki sendiri sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas,
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha, sedangkan syarat tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain, sehingga mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling kepada “lintah darat” yang biasanya meminta syarat yang berat dan memungut biaya yang tinggi,
3. Tingkat pendidikan mereka yang rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar. Anak-anak mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah, karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik di rumah, sehingga secara turun-temurun mereka terjatuh dalam keterbelakangan garis kemiskinan,
4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar petani, karena pertanian bekerja dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka kemudian bekerja sebagai “pekerja bebas”, berusaha apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka dibawah garis kemiskinan, di dorong dengan kesulitan hidup di desa maka banyak diantara mereka mencoba berusaha di kota,
5. Kebanyakan diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan, sedangkan kota di banyak negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa. Apabila di negara-negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga dalam perkembangan industri. Bahkan, sebaliknya perkembangan teknologi di kota justru menarik pekerjaan lebih banyak tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota dalam kantong-kantong kemelaratan.

Menurut Todaro dalam Khabhibi (2013, hlm.18) masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut :

- 1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,
- 2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan,
- 3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya,
- 4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara,
- 5) perbedaan struktur industri,
- 6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain,
- 7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan

dalam negeri.

d. Jenis kemiskinan

Suryawati (2005, hlm. 122) membagi kemiskinan secara sederhana dan umum menjadi beberapa ukuran:

1) Kemiskinan Absolut

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan absolut apabila memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ukuran ini digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk melangsungkan hidup.

2) Kemiskinan Relatif

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan relatif apabila kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan ukuran ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan apabila tingkat hidup masyarakat berubah, sehingga pengukuran kemiskinan relatif bersifat dinamis atau akan selalu ada.

3) Kemiskinan Kultural

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan kultural apabila individu atau kelompok tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain maupun ada peluang, dengan kata lain individu atau kelompok tersebut miskin karena sikapnya sendiri, yaitu pemalas dan tidak ada usaha untuk memperbaiki kehidupannya ke kondisi yang lebih baik.

4) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan

Menurut Nafziger (2012, hlm. 382) berpendapat bahwa *“To end poverty and boost shared prosperity, countries need robust, inclusive economic growth. And to drive growth, they need to build human capital through investment in health, education and social protection for all their citizens”*. yang artinya kemakmuran harus sama rata di seluruh daerah

Faktor faktor yang menjadi penyebab kemiskinan menurut Kuncoro dalam Itang (2014, hlm. 7-8) yaitu:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang,

penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertidadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti pendapatan. Tapi itu hanyalah masalah klasik. Sekarang penyebab kemiskinan adalah karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah seperti masuk perguruan tinggi atau SMA.

Penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor dalam Itang (2014, hlm. 8-10), yaitu faktor ekstern dan intern:

a. Faktor intern

1. Sikap.
Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.
2. Pengalaman dan pengamatan.
Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.
3. Kepribadian.
Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. 4. Konsep diri. Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan frame of

reference yang menjadi awal perilaku.

4. **Motif**
Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.
5. **Persepsi**
Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.

b. Faktor eksternal

1. **Kelompok referensi.**
Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.
2. **Keluarga.**
Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.
3. **Kelas sosial.**
Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.
4. **Kebudayaan.**
Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo

dan Aziz dalam Itang (2014, hlm.12-13) yang dikutip oleh Sarul Mardianto, yaitu:

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah.
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Malas Bekerja
Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
3. Keterbatasan Sumber Alam
Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
4. Terbatasnya Lapangan Kerja
Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
5. Keterbatasan Modal
Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
6. Beban Keluarga
Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

2. Angka Partisipasi Sekolah

a. Pengertian Angka Partisipasi Sekolah

Menurut Purwanto (2017, hlm. 10) menjelaskan bahawa Pendidikan merupakan “segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan”

Rasidin dan Bonar (2004) yang menyatakan, “Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan”

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020 “Angka Partisipasi

Sekolah didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk usia sekolah yang bersesuaian”. Angka Partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyaknya penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Rumusan angka partisipasi sekolah menurut BPS sebagai berikut:

$$\text{APS 7 – 12 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 13 – 15 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 16 – 18 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 19 – 24 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Menurut BPS 2010 dalam Aminah (2016, hlm.4) “APS adalah salah satu upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang bersekolah”. “APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui kemajuan pendidikan di suatu daerah”, dalam Karini (2018, hlm.106).

“APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah”, dalam Karini (2018, hlm.106). Maka dari itu jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan semakin besar. Akan tetapi meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tidak selalu diartikan dengan meningkatnya APS.

Menurut Badan Pusat Statistika (2020) terdapat tiga kategori APS berdasarkan usia yaitu 7-12 tahun (tingkat SD), 13-15 tahun (tingkat SMP/MTs), 16-18 tahun (tingkat SMA/SMK) dan 19-24 tahun (tingkat Perguruan Tinggi).

Menurut BPS tahun 2015 dalam Raymond (2017, hlm.6) “indikator yang bisa digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan diantaranya ialah Angka Partisipasi Sekolah (APS)”. Angka Partisipasi Sekolah adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, menurut Raymond (2017, hlm. 6). APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Angka partisipasi sekolah muncul dianggap sebagai tolok ukur kinerja layanan pendidikan berdasarkan pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Ayat 1, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Ayat 2, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Ayat 3, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Ayat 5, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Faktor Penyebab Angka Partisipasi Sekolah

Menurut Karini (2018, hlm.107) Faktor Penyebab Angka Partisipasi Sekolah:

Masalah ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) dan tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengirim anak-anak ke sekolah, karena pendidikan memang membutuhkan biaya yang relatif besar. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, akan mengalami kesulitan mengeluarkan biaya yang dibutuhkan proses pembelajaran. Seiring dengan hal tersebut, banyak masyarakat miskin yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini khususnya dalam pemerataan pendidikan di setiap daerah.

c. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Angka Partisipasi Sekolah

Faktor-faktor yang memengaruhi angka partisipasi sekolah di Provinsi Jawa Barat menurut penelitian yang dilakukan Luh (2019, hlm.179) adalah:

1. Angka melek huruf
2. Rasio jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah
3. Presentase sumber air minum tidak bersih
4. Rasio jumlah guru terhadap jumlah penduduk usia sekolah
5. Persentase angkatan kerja
6. Persentase kemiskinan
7. Pendapatan asli daerah (PAD)
8. Produk domestik regional bruto (PDRB)
9. Persentase desa

Terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan menurut Arzelina (2019, hlm.192) antara lain:

1. Variabel angka harapan lama sekolah
2. Persentase penduduk miskin, dan
3. Kepadatan penduduk

Berlian (2011, hlm.43) mengatakan dalam penelitiannya bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tidak tercapainya angka partisipasi sekolah meliputi faktor sebagai berikut:

1. Kemiskinan penduduk
2. Kesulitan menuju sekolah
3. Kurangnya layanan pendidikan
4. Rendahnya siswa terhadap pendidikan dan motivasi orangtua
5. Kurangnya dukungan terhadap pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat
6. Faktor sosial budaya

Budiarto (2012, hlm. 9) dalam penelitiannya mengatakan “faktor-faktor yang mempengaruhi anak melanjutkan ke sekolah menengah yaitu pemahaman diri siswa, faktor keluarga, dan faktor sekolah menengah pertama tempat belajar”. Sedangkan Windarto (2013, hlm. 107) dalam penelitiannya mengatakan “faktor-

faktor yang mempengaruhi anak melanjutkan ke sekolah menengah meliputi lingkungan siswa, informasi pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan pemenuhan keluarga”. Adapun rumus menghitung tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika, seperti berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam rangka membantu menyajikan penulisan penelitian ini, maka penulis juga mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran dengan harapan hasil penelitian dapat tersaji secara originalitas dan mudah dipahami.

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pilih Karini (2018)	Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SMAN 1 Pangkalpinang	Diketahui secara rata-rata bahwa APS berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini	Sama-sama meneliti tentang angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun dan tingkat kemiskinan	1. Subjek penelitian di Provinsi Bangka Belitung 2. Perbedaan penggunaan variabel x

				bermanfaat untuk pemerintah daerah agar terus meningkatkan APS, karena hal tersebut terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan.		dan y yang terbalik
2.	Ummy Zulfa Rahmatin dan Soejoto (2017)	Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kota Surabaya	Kota Surabaya	Tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah berpengaruh negatif secara signifikan sebesar	Penelitian ini menggunakan variabel X(1) dan Y yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai acuan	Subjek penelitian di Kota Surabaya dan tidak menggunakan variable X (2)

				<p>55,33% dimana pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah sebesar 22,62% dan 32,71%.</p> <p>Peningkatan kemiskinan diikuti oleh penurunan aps dan sebaliknya.</p> <p>Begitu pula kenaikan jumlah sekolah akan</p>	<p>penelitian.</p>	
--	--	--	--	---	--------------------	--

				<p>diikuti oleh penurunan aps. Meskipun jumlah sekolah lebih dominan, tetapi terdapat pengaruh kebijakan pemerintah yang mendominasi perubahan jumlah sekolah.</p> <p>Penurunan jumlah sekolah sebagai keputusan pemerintah</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				dalam mengembalikan kestabilan angka aps, artinya selama aps belum meningkat maka beberapa sekolah perlu ditutup untuk memudahkan fokus pemerintah pada peningkatan aps.		
3.	Dini Amaliah (2015)	Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap	Provinsi DKI Jakarta	Tidak terdapat pengaruh signifikan Angka	Sama sama membahas tentang partisipasi	Subjek penelitian di Provinsi DKI Jakarta,

		Presentase Penduduk Miskin		Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni terhadap persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2009-2013 baik secara parsial maupun secara bersama- sama yang ditunjukkan oleh besarnya F hitung	pendidikan dan kemiskinan	berbeda judul dengan penelitian ini yaitu partisipasi pendidikan yg mana cakupannya lebih luas dan bukan partisipasi sekolah
--	--	-------------------------------	--	---	------------------------------	---

				0,572 < dari F tabel 9,55 pada taraf signifikan 0,05.		
4.	Ridzky Giovanni (2018)	Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016	Pulau Jawa	hasil analisis data menunjukkan bahwa pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-	Membahas tentang tingkat kemiskinan	penelitian ini meneliti tentang Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan sedangkan peneliti sekarang hanya membahas tentang partisipasi

				2016, sedangkan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.		sekolah dan subjek penelitiannya berbeda
5.	Sumarno, SE (2019)	Angka Partisipasi Sekolah Kasar Sma Rendah Dampak Dari Tingkat Kemiskinan Dan Upaya Mengatasinya Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	Tingkat Kemiskinan Berpengaruh Negatif Secara Signifikan Sebesar 55,33%. Peningkatan Kemiskinan Diikuti Oleh Penurunan Aps Dan Sebaliknya. Begitu Pula	Sama-sama meneliti angka partisipasi sekolah dan tingkat kemiskinan	Subjek penelitian yang berbeda dan terdapat perbedaan pada variabelnya

				Kenaikan Jumlah Sekolah Akan Diikuti Oleh Kenaikan Aps.		
--	--	--	--	---	--	--

C. Kerangka pemikiran

Berdasarkan kajian studi pustaka yang telah penulis lakukan, dapat dikatakan bahwa angka partisipasi sekolah dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020 “Angka Partisipasi Sekolah didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk usia sekolah yang bersesuaian”. Angka Partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyaknya penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang sudah tersedia. “APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah”, dalam Karini (2018, hlm.106). Maka dari itu jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan semakin besar. Akan tetapi meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tidak selalu diartikan dengan meningkatnya APS. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Menurut Purwanto (2017, hlm. 10) menjelaskan bahawa Pendidikan merupakan “segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan”. Maka dari itu pendidikan diperlukan untuk memperbaiki kehidupan dan perkembangan jasmani maupun rohani kearah yang lebih baik.

Menurut Karini (2018, hlm.107) Faktor Penyebab Angka Partisipasi Sekolah yaitu masalah ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) dan tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengirim anak-anak ke sekolah, karena pendidikan memang membutuhkan biaya yang relatif besar. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, akan mengalami kesulitan mengeluarkan biaya yang dibutuhkan proses pembelajaran. Seiring dengan hal tersebut, banyak masyarakat miskin yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini khususnya dalam pemerataan

pendidikan di setiap daerah.

Faktor-faktor yang memengaruhi tidak tercapainya angka partisipasi sekolah menurut Berlian (2011, hlm.43) yaitu kemiskinan penduduk, kesulitan menuju sekolah, kurangnya layanan pendidikan, rendahnya siswa terhadap pendidikan dan motivasi orangtua, kurangnya dukungan terhadap pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat, dan faktor sosial budaya.

Menurut Badan Pusat Statistika (2020) “kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran”. Menurut Kumalasari dalam Karini (2018, hlm. 105) kemiskinan adalah “keadaan terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan”. Kemiskinan merupakan sebuah keadaan dimana individu ataupun kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik itu kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang masih sulit untuk diselesaikan disetiap negara, dan termasuk di Indonesia. Saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia berangsur-angsur terus mengalami penurunan setiap tahunnya, meskipun begitu tingkat kemiskinan di Indonesia masih pada angka yang cukup tinggi.

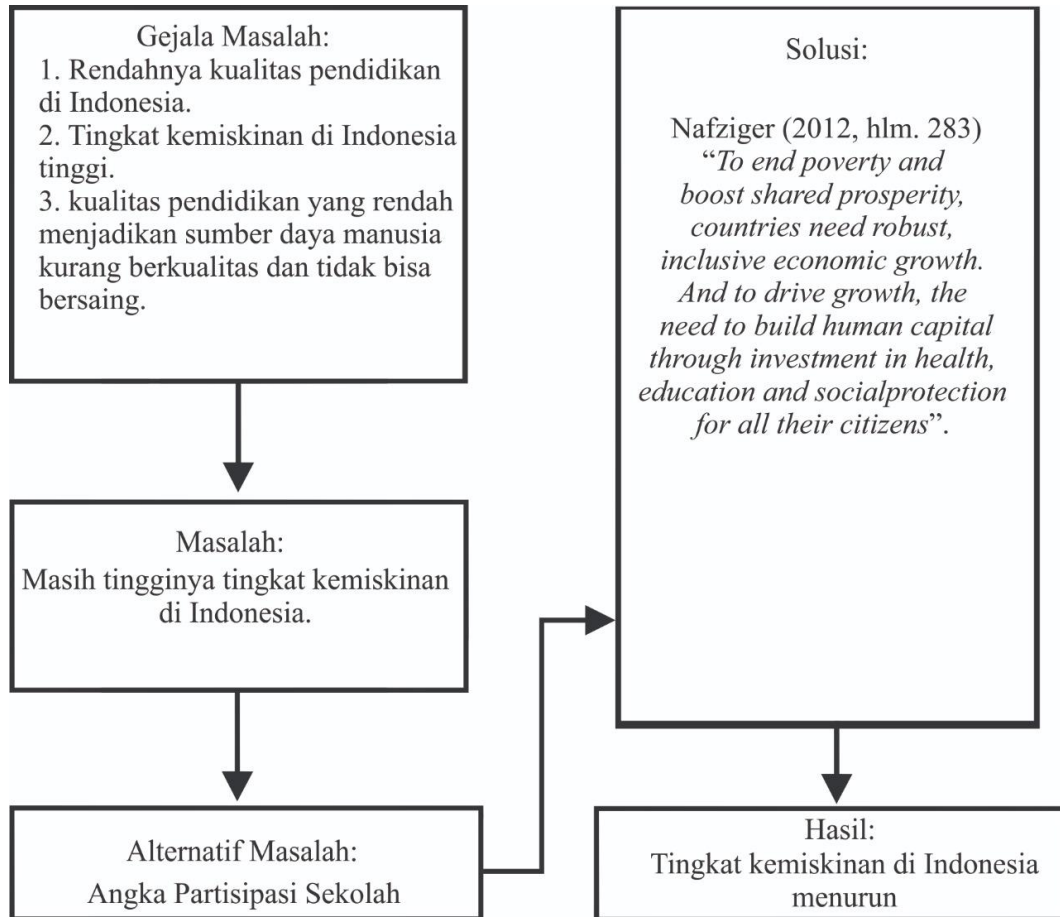
Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu Negara menurut Hartono dan Azis dalam Itang (2014, hlm.12-13) yaitu pendidikan yang terlampau rendah, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Rasa malas untuk bekerja, adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Keterbatasan sumber alam, suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin. Terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan lapangan kerja akan membawa

konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Keterbatasan modal, seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Beban keluarga, seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Dalam kutipan di atas salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin layak pula pekerjaan yang bisa didapatkan orang tersebut dan hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperolehnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Rasidin dan Bonar (2004) yang menyatakan, “Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan”. Menurut Nafziger (2012, hlm. 382) berpendapat bahwa *“To end poverty and boost shared prosperity, countries need robust, inclusive economic growth. And to drive growth, they need to build human capital through investment in health, education and social protection for all their citizens”*. yang artinya kemakmuran harus sama rata di seluruh daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2020), tingkat kemiskinan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, dimulai dari tahun 2017 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 26,58 juta orang, tahun 2018 berjumlah 25,67 juta orang, dan pada tahun 2019 berjumlah 25,14 juta orang. Bisa dikatakan bahwa turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, karena pada saat yang bersamaan angka partisipasi sekolah di Indonesia terus mengalami kenaikan. Berdasarkan uraian tersebut, Angka Partisipasi Sekolah (APS) diduga mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa angka partisipasi sekolah memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka dari itu, peneliti perlu merumuskan kerangka pemikiran agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasannya. Angka Partisipasi Sekolah dalam kaitannya dengan tingkat kemiskinan dapat diilustrasikan dalam kerangka pemikiran berikut ini.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan tersebut, dalam penelitian ini hubungan antar variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Ket :

X : Variabel bebas (Angka Partisipasi Sekolah)

Y : Variabel terikat (Kemiskinan)

→ : Pengaruh variabel X terhadap Y

Gambar 2.2
Bagan Paradigma Pemikiran

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Dalam buku panduan penulisan KTI FKIP Unpas (2020, hlm. 22), “asumsi merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima peneliti, yang dimana asumsi berfungsi sebagai landasan bagi perumusan hipotesis”. Adapun asumsi dalam penelitian ini yaitu, tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi jumlah kemiskinan.

2. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018, hlm. 63) “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Adapun perumusan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) adalah sebagai berikut:

$H_0 : \rho_{yx} = 0$ = Tidak terdapat kaitan angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

$H_a : \rho_{yx} \neq 0$ = Terdapat kaitan angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

